

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, AGLOMERASI INDUSTRI, PMDN, BELANJA PEMERINTAH, DAN IPM TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI KAWASAN KEDUNGSEPUR TAHUN 2011-2020

Ade Tiara Sukmawati* dan Mulyo Hendarto Robertus

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Email: adetiariasukmawati@students.undip.ac.id

ABSTRACT

Inequality is a common problem that occurs along with the economic development process of a region. The difference in endowment factors in each region is the cause of the widening level of inequality. This study aims to analyse the effect of economic growth, industrial agglomeration, domestic investment (PMDN), government spending, and Human Development Index (HDI) on regional inequality in the KEDUNGSEPUR Region in 2011-2020. The level of regional inequality is calculated using Theil's Entropy Index. This study uses the Generalised Least Square (GLS) regression analysis method with a fixed effect model. The data used is panel data which includes cross section of 6 regencies/cities in the KEDUNGSEPUR region and time series from 2011-2020. The results show that the variables of economic growth, industrial agglomeration, and government spending partially have a negative and significant effect on regional inequality in the KEDUNGSEPUR Region. The Human Development Index (HDI) partially has a positive and significant effect on regional inequality, while domestic investment (PMDN) partially has an insignificant effect on regional inequality.

Keywords: Regional Inequality, Economic Growth, Industrial Agglomeration, and HDI.

 <https://doi.org/10.14710/djoe.39352>



[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan pemerataan menjadi aspek yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Seringkali terdapat *trade-off* antara kedua aspek tersebut apabila pemerataan lebih diutamakan maka akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan maka akan semakin besar kemungkinan terjadi ketimpangan. Ketimpangan terjadi karena terdapat perbedaan *endowment factor* seperti kandungan sumber daya alam dan kondisi demografis pada setiap wilayah. Menurut Hipotesa Neoklasik pada awal proses pembangunan, ketimpangan antar wilayah cenderung meningkat, namun apabila proses pembangunan terus berlanjut ketimpangan akan semakin menurun.

Tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diukur dengan Indeks Entropi Theil yang diproksi menggunakan pendapatan per kapita. Perhitungan Indeks Entropi Theil memiliki penafsiran apabila nilai indeks mendekati 1 (satu) artinya sangat timpang, dan sebaliknya apabila nilai indeks mendekati 0 (nol) artinya sangat merata (Sjafrizal, 2008).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi menetapkan Kawasan KEDUNGSEPUR sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan KEDUNGSEPUR terdiri dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan. Perbedaan struktur ekonomi di setiap Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap tingginya tingkat ketimpangan wilayah. Indeks Entropi Theil menunjukkan tingkat ketimpangan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSEPUR yang cenderung mengalami fluktuasi selama tahun 2011-2020 (Tabel 1). Kota Semarang menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi, sementara Kabupaten Grobogan memiliki tingkat ketimpangan paling rendah di Kawasan KEDUNGSEPUR.

Tabel 1. Indeks Entropi Theil Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSEPUR Tahun 2011-2020

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Kendal	1,75	1,75	1,77	1,76	1,76	1,76	1,77	1,78	1,78	1,82
Kabupaten Demak	0,71	0,70	0,70	0,68	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,72
Kabupaten Semarang	1,96	1,95	1,96	1,95	1,94	1,92	1,91	1,90	1,88	2,04
Kota Salatiga	4,53	4,50	4,52	4,49	4,44	4,40	4,39	4,36	4,35	4,77
Kota Semarang	4,72	4,69	4,69	4,68	4,64	4,61	4,64	4,62	4,64	5,80
Kabupaten Grobogan	0,54	0,54	0,54	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah (2023)

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik menyatakan bahwa terdapat perbedaan kondisi ekonomi, sosial dan budaya pada setiap wilayah sehingga mobilitas faktor produksi baik modal dan tenaga kerja terhambat dan cenderung terkonsentrasi di wilayah yang lebih maju (Sjafrizal, 2008). Teori tersebut menjadi dasar dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menjadi target utama dalam pembangunan karena diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap wilayah menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya (Kurniawan & Sugiyanto, 2013). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSEPUR mengalami fluktuasi setiap tahunnya selama tahun 2011-2020. Kota Semarang memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi diantara Kabupaten/Kota lainnya di Kawasan KEDUNGSEPUR, sedangkan Kabupaten Grobogan menjadi yang terendah.

Aglomerasi industri merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi yang menimbulkan keuntungan aglomerasi dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Daerah-daerah dengan konsentrasi industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah yang tidak memiliki konsentrasi industri pengolahan karena perbedaan akumulasi modal (Sodik & Iskandar, 2007). Aglomerasi industri dihitung menggunakan Indeks Balassa yang merupakan rasio proporsi jumlah tenaga kerja

sektor industri di Kabupaten/Kota terhadap Provinsi (Sbergami, 2002). Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang memiliki tingkat aglomerasi meskipun tergolong lemah, sedangkan di Kabupaten Grobogan tidak terjadi aglomerasi selama kurun waktu 2011-2020.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional, karena akan mendorong kemajuan teknologi sehingga terjadi spesialisasi dan penghematan produksi dalam skala luas (Anggraini, 2018). Semakin banyak investasi yang masuk ke dalam suatu wilayah akan meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, teori Myrdal menyatakan bahwa investasi cenderung menambah ketidakmerataan karena adanya perbedaan keuntungan lokasi pada setiap wilayah (Jhingan, 2016). Selama periode tahun 2011-2020, Kota Semarang dan Kabupaten Demak memiliki realisasi investasi PMDN yang cukup besar di Kawasan KEDUNGSEPUR, sedangkan Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga menjadi wilayah dengan realisasi PMDN terkecil.

Belanja pemerintah merupakan dana alokasi pembangunan dari pemerintah yang juga sangat diperlukan oleh setiap wilayah. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan (Todaro & Smith, 2003). Semakin besar rasio pengeluaran pemerintah yang ditujukan langsung kepada masyarakat akan meningkatkan pendapatan perkapita yang selanjutnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan (Sucihati, 2016). Penelitian ini menggunakan realisasi belanja langsung pemerintah sebagai proksi dari variabel belanja pemerintah. Realisasi belanja langsung pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSEPUR dalam kurun waktu 2011-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator sosial dalam pembangunan suatu negara yang dapat merepresentasikan produktivitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah (Kuncoro, 2003). Indikator dalam pengukuran IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; serta standar hidup layak. Teori *human capital* menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan. Demikian karena pendidikan berperan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja (Jhingan, 2016). Nilai IPM setiap Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSEPUR cenderung meningkat setiap tahunnya selama periode tahun 2011-2020.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengisi *gap* pada penelitian terdahulu (*research gap*) yang meliputi periode waktu, alat ukur ketimpangan, variabel, dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Sebelumnya, Didia (2016) telah melakukan penelitian terkait analisis ketimpangan pembangunan di Kawasan KEDUNGSEPUR pada tahun 2008-2013. Penelitian tersebut menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan, sedangkan penelitian ini menggunakan Indeks Entropi Theil seperti pada penelitian Wulandari & Sakti (2020). Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi, aglomerasi industri, PMDN, belanja pemerintah, dan IPM sebagai variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen ketimpangan wilayah. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama sepuluh tahun dari tahun 2011 sampai 2020. Selain itu, terdapat kesenjangan terkait lokasi penelitian, unit analisis, periode waktu, alat ukur ketimpangan, variabel penelitian, dan perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu lainnya. Perbedaan tersebut menjadi landasan dilakukan penelitian ini

dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Industri, PMDN, Belanja Pemerintah, dan IPM Terhadap Ketimpangan Wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR Tahun 2011-2020”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi Model Neoklasik

Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kegiatan produksi. Kegiatan produksi pada suatu daerah selain ditentukan oleh potensi yang dimiliki daerah tersebut, juga dipengaruhi oleh adanya mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Adanya peningkatan kegiatan produksi menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga model ini diformulasikan dari fungsi Cobb-Douglas sebagai berikut:

$$Y = A K^{\alpha} L^{\beta}, \quad \alpha + \beta = 1 \quad (1)$$

di mana Y menggambarkan PDRB, K adalah modal, dan L tenaga kerja. Selanjutnya, persamaan tersebut diturunkan terhadap variabel t dan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$y = a + \alpha k + (1 - \alpha) l \quad (2)$$

di mana y menunjukkan peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekonomi, a adalah perubahan teknologi produksi, k adalah penambahan modal atau investasi, serta l adalah peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Berdasarkan persamaan tersebut, faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah kemajuan teknologi, penambahan modal atau investasi, dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja (Sjafrizal, 2008).

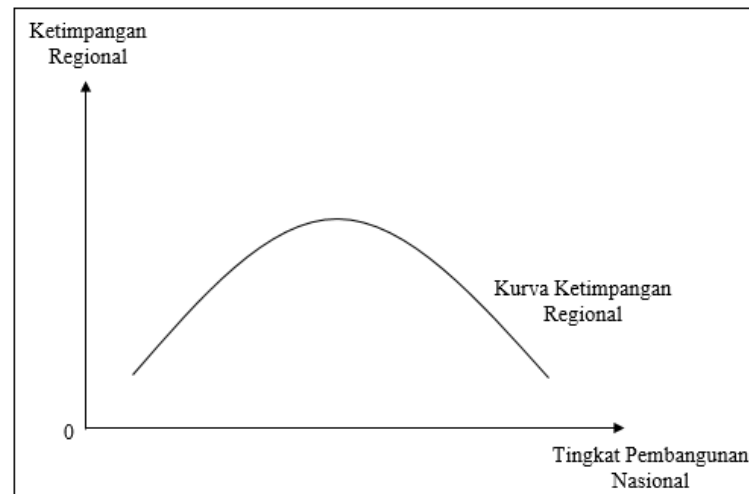
Teori *Backwash-Spread Effect*

Konsep pusat pertumbuhan menjelaskan pemikiran Perroux tentang adanya konsentrasi kegiatan industri pada daerah tertentu yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Sjafrizal, 2008). Adanya suatu pusat pertumbuhan tersebut menimbulkan dampak balik (negatif) dan dampak sebar (positif). Teori Myrdal mengatakan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi akan menyebabkan daerah maju semakin maju dan daerah tertinggal semakin terbelakang. Kondisi tersebut disebut dengan dampak balik (*backwash effect*) dan dampak menyebar (*spread effect*). Apabila *backwash effect* lebih besar dari *spread effect*, maka dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan regional antar wilayah (Jhingan, 2016).

Teori Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan terjadi akibat adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang ada pada setiap wilayah. Perbedaan tersebut menyebabkan kemampuan daerah dalam mendorong proses pembangunan berbeda pula. Oleh karena itu, biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*undeveloped region*). Hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah dijelaskan oleh Hipotesa Neoklasik. Menurut Hipotesa Neoklasik, pada tahap awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan cenderung meningkat. Proses tersebut

terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Apabila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah akan semakin menurun (Sjafrizal, 2008). Kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik (*Reverse U-shape Curve*) ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Hipotesa Neoklasik
Sumber: Sjafrizal (2008)

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Kendal, BPS Kabupaten Demak, BPS Kabupaten Semarang, BPS Kota Salatiga, BPS Kota Semarang, BPS Kabupaten Grobogan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, data sekunder juga diperoleh dengan studi literatur dan artikel yang terkait dengan topik ketimpangan wilayah.

Definisi Operasional Variabel

Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah disebabkan karena adanya ketidakmerataan pembangunan. Ketimpangan wilayah diukur dengan rumus Indeks Entropi Theil yang diproksi menggunakan PDRB per kapita. Tidak terdapat batas atas dan batas bawah pada Indeks Entropi Theil. Rumus perhitungan Indeks Entropi Theil adalah sebagai berikut:

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{y_{ij}/Y\} \log \left[\frac{\{y_{ij}/Y\}}{\{n_{ij}/N\}} \right] \quad (3)$$

Dimana:

y_{ij} : PDRB per kapita Kabupaten i di Provinsi j

Y : Jumlah PDRB per kapita seluruh Provinsi j
n_{ij} : Jumlah penduduk Kabupaten i di Provinsi j
N : Jumlah penduduk seluruh Kabupaten

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan cara selisih nilai PDRB tahun ke-*n* dengan PDRB tahun sebelumnya dibagi dengan nilai PDRB tahun sebelumnya kemudian dikalikan 100. Satuan laju pertumbuhan ekonomi adalah persen.

Aglomerasi Industri

Aglomerasi industri merupakan pemusatan atau terkonsentrasinya industri pada suatu wilayah. Indeks Balassa, yang merupakan ukuran aglomerasi, adalah rasio proporsi jumlah tenaga kerja sektor industri di kabupaten/kota terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri dalam satu provinsi. Nilai indeks balassa yaitu antara 0 sampai 4. Semakin besar nilai indeks balassa, maka semakin terpusat suatu industri. Rumus perhitungan indeks Balassa adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Balassa} = \frac{\left(\frac{E_{ij}}{\sum_j E_{ij}} \right)}{\left(\frac{\sum_i E_{ij}}{\sum_i \sum_j E_{ij}} \right)} \quad (4)$$

di mana:

i : sektor
j : wilayah
E : tenaga kerja

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Investasi adalah kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi atau produksi. Penelitian ini menggunakan PMDN sebagai proksi variabel investasi. Satuan PMDN yang digunakan adalah juta rupiah.

Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan bersumber dari penerimaan pajak. Belanja daerah dibagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Penelitian ini menggunakan belanja langsung sebagai proksi variabel belanja pemerintah. Belanja langsung sering disebut belanja pembangunan atau pengeluaran pembangunan. Satuan belanja pemerintah yang digunakan adalah juta rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menghitung IPM pada dimensi kesehatan adalah angka harapan hidup (AHH), pada dimensi pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS), serta pada dimensi pengeluaran adalah pengeluaran per kapita. Nilai IPM yaitu antara 0-100.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk regresi data panel dalam penelitian ini adalah *Generalized Least Square* (GLS) dengan alat analisis yang digunakan adalah Eviews 10. Uji pra regresi data panel dilakukan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Setelah terpilih model terbaik, dilakukan deteksi asumsi Gauss-Markov yang digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam data dan model penelitian. Deteksi tersebut meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Kemudian dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui kelayakan model penelitian meliputi uji signifikansi parsial (Uji-t), uji signifikansi simultan (Uji-F), dan taksiran R^2 . Model persamaan regresi terhadap variabel dependen ketimpangan wilayah dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$ET_{it} = \beta_0 + \beta_1 GROWTH_{it} + \beta_2 AG_{it} + \beta_3 LOG(PMDN)_{it} + \beta_4 LOG(GE)_{it} + \beta_5 IPM_{it} + DUMMY + \mu_{it} \quad (5)$$

keterangan:

ET	: Indeks Entropi Theil
GROWTH	: Laju pertumbuhan ekonomi
AG	: Aglomerasi industri
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
GE	: Belanja pemerintah
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
DUMMY	: Dummy (tahun 2020 diasumsikan 1 dan tahun lainnya 0)
LOG	: Logaritma
β_0	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien regresi variable independen
μ	: <i>error term</i>
i	: <i>cross section</i> (Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSEPUR)
t	: <i>time series</i> (periode tahun 2011-2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang lebih tepat digunakan untuk melakukan regresi data panel. Penelitian ini menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) dengan memberi pembobotan pada variasi data yaitu *cross-section Seemingly Unrelated Regression* (*cross-section SUR*). Penambahan pembobot tersebut dalam regresi dilakukan untuk memperbaiki masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Berikut adalah hasil regresi data panel dalam penelitian ini (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi GLS Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.487310	0.208255	11.94359	0.0000
GROWTH	-0.021612	0.007100	-3.043864	0.0038
AG	-0.088831	0.031839	-2.789999	0.0075
LOG(PMDN)	0.001814	0.002250	0.806185	0.4241
LOG(GE)	-0.079599	0.027604	-2.883612	0.0059
IPM	0.015069	0.007276	2.070975	0.0438
DUMMY	0.131954	0.058219	2.266510	0.0280
R-squared	0.997797			
Adjusted R-squared	0.997292			
F-statistic	1976.560			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji-t

Uji-t digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen secara individu atau parsial terhadap variabel dependen dalam model (Ghozali & Ratmono, 2017). Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai t-statistik variabel pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari t-tabel ($-3,043864 < 1,67412$) dengan nilai probabilitas yaitu 0,0038 lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 0,05. Selanjutnya, variabel aglomerasi industri memiliki nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($-2,789999 < 1,67412$) dengan nilai probabilitas yaitu 0,0075 lebih kecil dari 0,05. Variabel belanja pemerintah juga memiliki nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($-2,883612 < 1,67412$) dengan nilai probabilitas yaitu 0,0059 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi industri, dan belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan wilayah. Nilai probabilitas variabel IPM yaitu 0,0438 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel ($2,070975 > 1,67412$), maka variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan wilayah. Kemudian, variabel PMDN memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan wilayah karena nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($0,806185 < 1,67412$) dengan nilai probabilitas yaitu 0,4241 lebih besar dari 0,05.

Uji-F

Uji-F menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017). Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai F-statistik lebih besar dari nilai F-tabel ($1976,560 > 2,28$) dengan probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel-variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, aglomerasi industri, PMDN, belanja pemerintah, dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan wilayah.

Taksiran R²

Koefisien R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017). Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai *R-squared* yaitu 0,997797 yang cukup besar dan mendekati satu. Selanjutnya, diketahui nilai *adjusted R-square* sebesar 0,997292 yang artinya sebesar 99,73 persen variasi ketimpangan wilayah dapat dijelaskan oleh

variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi industri, PMDN, belanja pemerintah, dan IPM. Sedangkan sisanya sebesar 0,27 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Interpretasi Hasil

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah

Menurut Hipotesis Neoklasik, pada awal proses pembangunan peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan wilayah, namun seiring dengan perkembangan perekonomian tingkat ketimpangan akan menurun (Todaro & Smith, 2003). Proses urbanisasi dan industrialisasi sangat berpengaruh terhadap semakin besarnya tingkat ketimpangan pada awal proses pembangunan, namun selanjutnya tingkat ketimpangan dapat menurun karena sektor-sektor ekonomi khususnya industri telah mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja pedesaan (Mansyur, Nursini, & Hamrullah, 2021). Berdasarkan hasil regresi model ketimpangan wilayah, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2011-2020. Hal tersebut berarti apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka dapat menurunkan ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Damayanti (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional.

Pengaruh Aglomerasi Industri terhadap Ketimpangan Wilayah

Tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah menuebabkan semakin lebarnya ketimpangan, karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi. Sebaliknya, daerah dengan konsentrasi ekonomi rendah memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih lambat (Sjafrizal, 2008). Hasil regresi penelitian ini menunjukkan bahwa variabel aglomerasi industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2011-2020. Artinya, semakin teraglomerasi suatu industri maka akan semakin menurun tingkat ketimpangan di Kawasan KEDUNGSEPUR. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis, Robiani, Marwa, & Chodijah (2017) dan Anshori (2021) yang membuktikan bahwa aglomerasi industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Terdapat sepuluh kawasan industri yang berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSEPUR. Mayoritas kawasan industri tersebut berkonsentrasi di Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kota Semarang.

Pengaruh PMDN Terhadap Ketimpangan Wilayah

Teori Myrdal menjelaskan bahwa investasi cenderung meningkatkan ketimpangan karena adanya perbedaan keuntungan lokasi pada setiap daerah (Jhingan, 2016). Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel investasi PMDN berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2011-2020. Hal tersebut berarti bahwa tingginya investasi PMDN belum mampu mengurangi tingkat ketimpangan wilayah. Penelitian ini sesuai dengan Handoko,

Riyanto, & Syaifullah (2020) dan Didia (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan investasi terhadap ketimpangan wilayah.

Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Ketimpangan Wilayah

Pengeluaran pemerintah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketimpangan antar daerah dan mendorong pemerataan antar daerah sehingga tercipta keseimbangan regional (Jhingan, 2016). Berdasarkan hasil estimasi regresi diketahui bahwa belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2011-2020. Artinya, semakin besar realisasi belanja pemerintah maka dapat mengurangi tingkat ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR. Belanja pemerintah dapat mempersempit ketidakmerataan karena ditujukan untuk penyediaan pelayanan publik seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Penelitian ini sesuai dengan Mansyur et al. (2021) yang menyatakan bahwa variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Wilayah

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2011-2020. Artinya, semakin tinggi IPM suatu wilayah akan menyebabkan ketimpangan semakin meningkat. Penelitian ini sesuai dengan Didia (2016) dan Olabu, O., & B. (2022) yang menyatakan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal tersebut terjadi karena daerah yang mengalami peningkatan IPM adalah daerah dengan IPM yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2011-2020.
2. Aglomerasi industri secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2011-2020.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2011-2020.
4. Belanja pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2011-2020.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2011-2020.
6. Pertumbuhan ekonomi, aglomerasi industri, PMDN, belanja pemerintah, dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2011-2020.

SARAN

Pemerintah perlu mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pembangunan melalui pembangunan kluster-kluster industri atau kawasan industri di setiap Kabupaten/Kota sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan dan program-program bantuan sosial. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode waktu yang lebih lama dan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan ketimpangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Y. (2018). *Kebijakan pengembangan investasi daerah*. Jakarta: Indocamp.
- Anshori, L. (2021). Analisis pengaruh aglomerasi, urbanisasi, dan investasi terhadap ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2), 1–15. <https://jimfeb.ub.ac.id/>
- Damayanti, L. (2017). Analisis dampak aglomerasi terhadap ketimpangan regional Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/>
- Didia, K. A. (2016). Analisis ketimpangan pembangunan di kawasan Kedungsepur. *Economics Development Analysis Journal*, 5(1), 101–108. <https://journal.unnes.ac.id/>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, M. S. H., Riyanto, W. H., & Syaifullah, Y. (2020). Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(4), 637–649. <https://ejournal.umm.ac.id/>
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (D. Guritno, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan* (3rd ed.). Yogyakarta: AMP YKPN.
- Kurniawan, B. R. A., & Sugiyanto, F. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, share sektor industri dan pertanian serta tingkat jumlah orang yang bekerja terhadap ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2002-2010. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/>
- Mansyur, K., Nursini, & Hamrullah. (2021). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. *Development Policy and Management Review*, 1(2), 79–107. <https://journal.unhas.ac.id/>
- Mukhlis, Robiani, B., Marwa, T., & Chodijah, R. (2017). Agglomeration of manufacturing industrial, economic growth, and interregional inequality in South Sumatra, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 214–224. <https://www.econjournals.com/>
- Olabu, F. Y., O., F. Z., & B., F. (2022). An analysis of regional inequality and the affecting factors in Sulawesi Island. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 3(1), 35–41. <https://scholarzest.com/>

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional kawasan perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi.
- Sbergami, F. (2002). *Agglomeration and economic growth: Some puzzles*. Geneva: Graduate Institute of International Studies.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Baduose Media.
- Sodik, J., & Iskandar, D. (2007). Aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi: Peran karakteristik regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(2), 117–129. <https://media.neliti.com/>
- Sucihati, H. (2016). Pengaruh kenaikan investasi swasta dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap ketimpangan pembangunan di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 4(1). <https://jurnal.untan.ac.id/>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wulandari, D., & Sakti, R. K. (2020). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, aglomerasi industri pengolahan, dan angkatan kerja terhadap disparitas pendapatan (studi kasus pada kawasan GERBANGKERTOSUSILA periode 2009-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(1), 1–15. <https://jimfeb.ub.ac.id/>